



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Administrasi Jakarta Selatan**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru , Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025.

Laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran tentang demografi , Struktur Organisasi , serta program kinerja , tanggungjawab serta sesuai dengan sasaran kinerja dari Kelurahan senayan.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridhoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 4 Maret 2026,
Lurah Kelurahan Senayan



Siti fauziah Ghozali
NIP 197206061996032003

DAFTAR ISI

Kata	
Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I : Pendaahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kelurahan Senayan	2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4. Dasar Hukum.....	4
1.5 . Program Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Publik Kelurahan.....	4
1.5.1. Lurah	4
1.5.2. Sekretaris Kelurahan.....	5
1.5.3. Seksi Pemerintahan.....	5
1.5.4. Seksi Kesejahteraan Rakyat	6
1.5.5.Seksi Ekonomi dan Pembangunan.....	7
1.6.Struktur Organisasi.....	9
1.7.Sumber daya Manusia.....	10
BAB II : Perencanaan Kinerja Kelurahan.....	11
2.1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025	11
2.2.Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan DaerahProvinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026.....	11
2.3. Ada 6 (enam) Isu strategis 2023-2026.....	12
2.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	13
2.5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	18
2.6. Program Kerja Badan Publik Kelurahan Senayan	18

BAB : Capaian Kinerja Kelurahan senayan.....	19
3.1. Realisasi Perjanjian Kinerja	19
3.2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	22
3.3. Program Kerja Badan Publik Kelurahan Senayan	22
 BAB: IV : PENUTUP.....	 27
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Saran.....	27

Daftar Gambar .

1.1 Peta Wilayah.....	3
1.2.Struktur Organisasi Kelurahan.....	9

Daftar Tabel.

1.3. Data ASN Kelurahan berdasarkan tingkat pendidikan.....	10
1.4. Data ASN berdasarkan Golongan.....	10
2.1. Perjanjian Kinerja perangkat Daerah Kelurahan Senayan	13
3.1. Realisasi Kinerja Kelurahan tahun 2025.....	19
3.2. Data Hasil Penilaian SKM tahun 2025.....	22
3.3. Posyandu Balita dan Lansia.....	23
3.4. Lokasi Penataan Kawasan.....	25
3.5. Target dan Capaian ZIS.....	25
3.6. Target dan Realisasi PBB	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Penyusunan SAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), di dalam Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban (laporan kinerja) secara periodik. Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur capaian target kinerja dan aspek strategis daerah serta penekanan isu strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. LKIP menjadi dokumen kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini merupakan esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai kebijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. LKIP Kelurahan

Senayan , Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.

1.2.Gambaran Umum Kelurahan Senayan

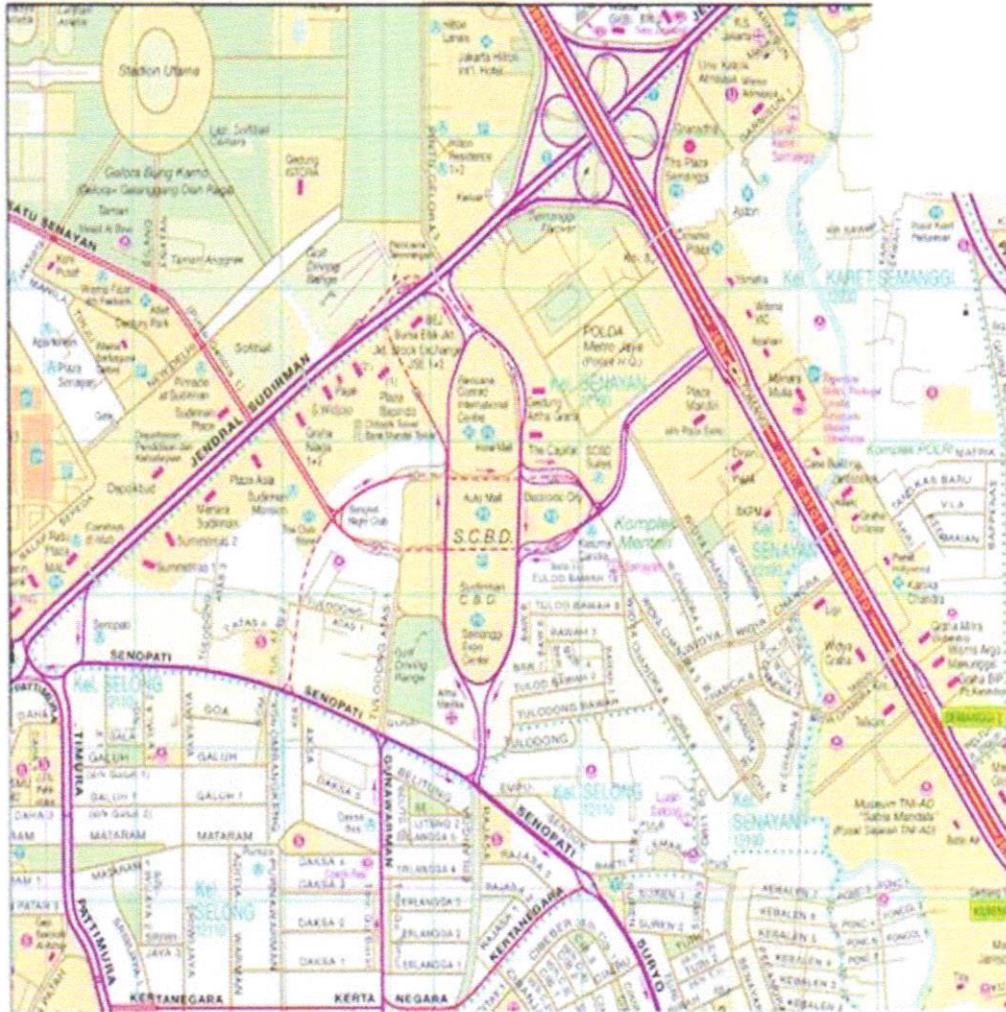
Kelurahan Senayan merupakan salah satu kelurahan yang terdapat diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. Di kecamatan tersebut terdapat 10 (sepuluh) kelurahan yaitu Kelurahan Gandaria Utara, Cipete Utara, Pulo, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Gunung, Selong, Rawa Barat dan Senayan. Masing-masing kelurahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti Kelurahan Senayan dengan luas wilayah 153,10 Ha yang terbagi menjadi terdiri dari 3 (tiga) RW (Rukun Warga) dan 15 RT (Rukun Tetangga).

Kantor Kelurahan Senayan berada di Jalan Tulodong Bawah X No.3, Rt.004 Rw 01, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, kode pos 12190. Wilayah Kelurahan Senayan sebagian merupakan wilayah pemukiman penduduk, wilayah perkantoran serta kompleks Menteri RI dan kompleks LIPI. Wilayah pemukiman penduduk berada di kawasan sebelah dalam dikelilingi dengan gedung-gedung pencakar langit disebelah luarnya. Di sisi Jalan Jendral Gatot Subroto dan Jalan Jenderal Sudirman terlihat jelas deretan gedung-gedung perkantoran. Hal ini terlihat juga di Jalan Senopati Raya. Sedangkan perumahan kompleks Menteri RI dan kompleks LIPI berada di kawasan Widya Chandra.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Senayan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Jend. Gatot Subroto/ Kel. Karet Semanggi
Kec. Setiabudi
- Sebelah Timur : Kali Krukut/Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang
Prapatan
- Sebelah Selatan : Jalan Senopati/ Jl. Tulodong Bawah/ Kel. Selong
- Sebelah Barat : Jalan Jend. Sudirman/Kel. Gelora Kec. Tanah Abang

Gambar 1.1.
Peta Wilayah



Jumlah Penduduk :

- Jumlah penduduk Laki-Laki : 1.388
- Jumlah penduduk Perempuan : 1.506
- Jumlah Wajib KTP Laki-Laki : 1.119
- Jumlah Wajib KTP Perempuan : 1.188
- Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki : 774
- Jumlah Kepala Keluarga Perempuan : 299

I.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Kelurahan Senayan 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai, serta sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang. Manfaat atas penyusunan LKIP Kelurahan Senayan Tahun 2025 adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sebagai bahan acuan untuk menyusun perencanaan kinerja tahun berikutnya.

1.4 Dasar Hukum

LAKIP kelurahan merupakan ringkasan capaian kinerja yang mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan Masyarakat serta administrasi pemerintahan ditingkat kelurahan Senayan. Dan sebagai dasar hukum Adalah peraturan Presiden no,or 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.5 Program kerja, Tugas dan Fungsi Badan Publik Kelurahan

Program Kerja Kelurahan adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dalam satu tahun anggaran yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Program kerja Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Kerja dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah.

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Kelurahan mempunyai tugas:

1.5.1. Lurah

Tugas dan Fungsi Lurah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 adalah :

- a. Menyusun Program kerja Kelurahan
- b. Mengatur kegiatan kelurahan
- c. Mengatur dan mendidtribusikan tugas bawahan sesuai tuas dan fungsinya

- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- e. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila diperlukan
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kegiatan pembangunan ,sosial,pelayanan masyarakat,serta pemberdayaan masyarakat
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan Satuan perangkat daerah lainnya.
- h. Melaksanakan kegiatan atau tugas lainnya yang diberikan camat baik lisan maupun tertulis dalam rangka pelaksanaan tugas

1.5.2. Sekretaris Kelurahan

Tugas : Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan pembinaan,mengarahkan dan mengendalikan,penyelenggaraan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi bidang keuangan,kepegawaian , rumah tangga, perlengkapan umum ketatausahaan, serta membantu mengkoordinasikan kegiatan di kelurahan.

- a. Menyusun program dan rencana kerja anggaran kegiatan kelurahan
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan petunjuk kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- e. Dan kegiatan lainnya yang ditugaskan lurah .

1.5.3. Seksi Pemerintahan

Tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian rukun warga dan rukun tetangga;
- b. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian dan kemitraan Lembaga

Musyawarah Kelurahan;

- c. melaksanakan pengoordinasian dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lingkup Kelurahan;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan kesatuan bangsa dan politik lingkup Kelurahan;
- f. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan Kelurahan;
- g. melaksanakan pengoordinasian, deteksi dini dan penyelesaian gangguan sosial di wilayah Kelurahan;
- h. melaksanakan pengoordinasian dan pemberian bantuan terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- i. melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat Kelurahan;
- j. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pelayanan umum dan administrasi pertanahan tingkat Kelurahan;
- k. melaksanakan pengoordinasian dan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- l. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi penyelesaian masalah/konflik warga;
- m. melaksanakan pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang pemerintahan tingkat Kelurahan;
- n. melaksanakan pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan; dan

1.5.4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas :

- a. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah Kelurahan, antara lain pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga
- b. berencana, kebudayaan, sosial, perpustakaan, kearsipan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan pendataan, bidang kesejahteraan rakyat di wilayah Kelurahan, antara lain permasalahan kesejahteraan sosial, permasalahan kesehatan masyarakat, potensi dan/atau terjadi kejadian yang luar biasa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian dengan UKPD yang menyelenggarakan urusan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah Kelurahan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mental spiritual di wilayah Kelurahan;
 - g. melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan lembaga dan/atau organisasi masyarakat bidang Kesejahteraan Rakyat tingkat Kelurahan, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan;
 - h. melaksanakan pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang
 - i. menular di wilayah Kelurahan;
 - j. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - k. melaksanakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan fisik dan sosial;
 - l. melaksanakan pelaksanaan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan, kesetiakawanan sosial, peduli sesama, gotong royong;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 - n. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan

- Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
- p. memfasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga;
 - q. memfasilitasi pencegahan penyebaran kasus penyakit berpotensi wabah dan Kejadian Luar Biasa;
 - r. memfasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, sesuai lingkup tugasnya; dan
 - s. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya.

1.5.5.Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas :

- a. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perekonomian dan pembangunan di wilayah Kelurahan, antara lain kondisi perekonomian masyarakat Kelurahan, industri rumah tangga, usaha mikro dan kecil serta kegiatan ekonomi masyarakat lainnya, serta pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan pendataan, bidang perekonomian dan pembangunan di wilayah Kelurahan, antara lain data perekonomian masyarakat, harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar, potensi Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro, potensi kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan, penyelenggaraan pengurusan penghambat aliran air pada saluran di jalan lingkungan termasuk tali dan mulut air yang membutuhkan peralatan dan/atau teknologi khusus;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
- d. melaksanakan pengoordinasian dengan UKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perekonomian dan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- e. melaksanakan pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang perekonomian dan pembangunan tingkat Kelurahan;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan lomba kebersihan tingkat Kelurahan;

- g. melaksanakan kegiatan penanganan segera prasarana dan sarana umum dalam bidang jalan, saluran, kebersihan, taman dan penerangan jalan di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum, seperti jalan lingkungan, saluran air lingkungan, saluran tersier dan prasarana mandi cuci kakus;
- i. melaksanakan penghijauan lingkungan pemukiman;
- j. melaksanakan penyusunan peta situasi, kondisi, potensi dan tingkat kerawanan kebersihan dan lingkungan wilayah Kelurahan;
- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
- l. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan penanganan sampah pada wilayah kelurahan sampai dengan pengangkutan ke lokasi pembuangan sementara, kecuali sampah dan kebersihan pada kawasan mandiri;
- m. melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan kebersihan lingkungan pemukiman masyarakat Kelurahan;
- n. menyusun pelaporan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sudah dan/atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya.

1.6. Struktur Organisasi

Gambar : 1.2.



1.7. Sumber Daya Manusia

**TABEL :1.3.
DATA PEGAWAI ASN KELURAHAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	KET
1.	SD / Sederajat	-	
2.	SMP / Sederajat	-	
3.	SMA / Sederajat	2	
4.	D3	-	
5.	S1	6	
6.	S2	2	

**TABEL :1.4.
DATA PEGAWAI ASN BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	KE`T
1.	Juru Muda / (I/a)	-	
2.	Juru Muda TK. I / (I/b)	-	
3.	Juru / (I/c)	-	
4.	Juru TK. I / (I/d)	-	
5.	Pengatur Muda / (II/a)	1	
6.	Pengatur Muda TK. I / (II/b)	-	
7.	Pengatur / (II/c)	-	
8.	Pengatur TK. I / (II/d)	-	
9.	Penata Muda / (III/a)	1	
10.	Penata Muda TK. I / (III/b)	4	
11.	Penata / (III/c)	4	
12.	Penata TK. I / (III/d)	4	
13.	Pembina / (IV/a)	1	
14.	Pembina TK. I / (IV/b)	-	
15.	Pembina Utama Muda / (IV/c)	-	
16.	Pembina Utama Madya / (IV/d)	-	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KELURAHAN

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005- 2025.

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni:

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;

Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;

Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan;

Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
- b. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
- c. 3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
- d. 6 (enam) issue strategis tahun 2023-2026.

2.3. Ada 6 (enam) Isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan-bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Dimensi lingkungan-bangun adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha. Dimensi perekonomian merupakan dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi. Dimensi manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama. Sedangkan dimensi pemerintahan adalah dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. (*sumber :Laporan LAKIP kota Jakarta Selatan tahun 2023*).

2.4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen resmi yang berisi penugasan dari kepala daerah kepada pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan target dan indikator kinerja yang terukur. Adapun tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan, transparansi, akuntabilitas, dan acuan evaluasi kinerja dalam satu tahun anggaran.

Tabel : 2.1.
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kelurahan Senayan tahun 2025

Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan	Indikator Kinerja Utama	Indikator	Target	Program, Kegiatan, dan Indikator yang akan dilaksanakan	Indikator Kinerja Utama	Output
PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	Indikator Kinerja Utama: Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	100%	1. Pelaksanaan Kurikulum Kejuruan 2. Pelaksanaan Program Kejuruan 3. Pelaksanaan Program Kejuruan 4. Pelaksanaan Program Kejuruan	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.
PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	Indikator Kinerja Utama: Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	100%	1. Pelaksanaan Kurikulum Kejuruan 2. Pelaksanaan Program Kejuruan 3. Pelaksanaan Program Kejuruan 4. Pelaksanaan Program Kejuruan	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.
PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	Indikator Kinerja Utama: Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	100%	1. Pelaksanaan Kurikulum Kejuruan 2. Pelaksanaan Program Kejuruan 3. Pelaksanaan Program Kejuruan 4. Pelaksanaan Program Kejuruan	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.
PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	PROGRAM PENGUKUTAN KECERDASAN	Indikator Kinerja Utama: Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	100%	1. Pelaksanaan Kurikulum Kejuruan 2. Pelaksanaan Program Kejuruan 3. Pelaksanaan Program Kejuruan 4. Pelaksanaan Program Kejuruan	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.	1. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 2. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 3. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan. 4. Jumlah Peserta Didik yang mengikuti pelatihan.

2.5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 14 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran komprehensif tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan public, baik secara kuantitas ataupun kualitas dengan membandingkan harapan dan kinerja layanan. Ada 6(enam) kategori pelayanan yaitu PPSU, Jumantik, PKK, Posyandu, RT RW, Tibum.

2.6. Program Kerja Badan Publik Kelurahan Senayan

Program kerja Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi :

- a. Pelayanan public dan administrasi, misalnya mengurus administrasi kependudukan, perizinan dan pelayanan warga sehari-hari.
- b. Penataan dan kebersihan, melakukan perawatan prasarana umum, penataan Kawasan, serta penataan kebersihan lainnya.
- c. Ketentraman dan ketertiban, yaitu berkoordinasi dengan tiga pilar, Pol. PP
- d. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi program pemberdayaan Masyarakat, PKK
- e. Kesejahteraan sosial dan Kesehatan, meliputi posyandu, penanganan stunting, bantuan sosial.

BAB III

CAPAIAN KINERJA KELURAHAN SENAYAN

TAHUN 2025

3.1. Realisasi Perjanjian Kinerja

Realisasi Kinerja secara umum tahun 2025 secara keseluruhan mencapai target sesuai perjanjian kinerja yang telah di buat. Berikut hasil realisasi kinerja :

Tabel : 3.1.
Realisasi Kinerja Kelurahan Senayan tahun 2025

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Konsolidasi	Polarisasi	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan/Evaluasi
Pelaksanaan Kewaspadaan Diri Masyarakat Tingkat Kelurahan	JUMLAH LAPORAN PROGRAM KEWASPADAAN DIRI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN YANG DISEDIAKAN	Laporan	Sum	Maximize	12	TW 1	3	3	100%	TW 1
						TW 2	6	6	100%	TW 2
						TW 3	9	9	100%	TW 3
						TW 4	12	12	100%	TW 4
Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMA Tingkat Kelurahan	JUMLAH LOMBA YANG MENGIKUTI PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN RT, RW DAN LMA TINGKAT KELURAHAN	Lomba	Take Last Kapan	Maximize	21	TW 1			N/A	TW 1
						TW 2			N/A	N/A
						TW 3			N/A	N/A
						TW 4	21	21	100%	TW 4
Penyenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan	JUMLAH LAPORAN HASIL KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KELURAHAN	Laporan	Sum	Maximize	2	TW 1			N/A	N/A
						TW 2			N/A	N/A
						TW 3			N/A	N/A
						TW 4	2	2	100%	TW 4
Penyenggaraan Posko Bencana Pemilu Tingkat Kelurahan	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN POSKO BERSAMA PEMILU TINGKAT KELURAHAN	Laporan	Sum	Maximize	1	TW 1			N/A	N/A
						TW 2			N/A	N/A
						TW 3			N/A	N/A
						TW 4	1	1	100%	TW 4
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	Laporan	Sum	Maximize	1	TW 1			N/A	N/A
						TW 2	1	1	100%	TW 2
						TW 3	1	1	100%	N/A
						TW 4	1	1	100%	N/A
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpunkan	JUMLAH LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN LAIN YANG DUMPUNKAN	Laporan	Sum	Maximize	12	TW 1	3	3	100%	TW 1
						TW 2	6	6	100%	TW 2
						TW 3	9	9	100%	TW 3
						TW 4	12	12	100%	TW 4
Pembentayan Masyarakat di Kelurahan	JUMLAH POKMAS DAN ORMAS YANG MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	Pokmas / Ormas	Take Last Kapan	Maximize	20	TW 1	20	20	100%	TW 1
						TW 2	20	20	100%	TW 2
						TW 3	20	20	100%	TW 3
						TW 4	20	20	100%	TW 4

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG DISELENGGARAKAN	Lembaga Kemasyarakatan	Sum	Maximize	1	TW 1				N/A	N/A
						TW 2				N/A	N/A
						TW 3				N/A	N/A
						TW 4	1	1	100%	TW 4	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	JUMLAH LAPORAN HASIL SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	Laporan	Sum	Maximize	4	TW 1	1	1	100%	TW 1	
						TW 2	2	2	100%	TW 2	
						TW 3	3	3	100%	TW 3	
						TW 4	4	4	100%	TW 4	
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Dokumen	Take Last Klien	Maximize	1	TW 1	1	1	100%	TW 1	
						TW 2	1	1	100%	TW 2	
						TW 3	1	1	100%	TW 3	
						TW 4	1	1	100%	TW 4	
Penyediaan Bahan/Material	JUMLAH PAKET BAHAN/MATERIAL YANG DISEDIAKAN	Paket	Take Last Klien	Maximize	1	TW 1	1	1	100%	TW 1	
						TW 2	1	1	100%	TW 2	
						TW 3	1	1	100%	TW 3	
						TW 4	1	1	100%	TW 4	
Fasilitas Kunjungan Tamu	JUMLAH LAPORAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	Laporan	Sum	Maximize	4	TW 1	1	1	100%	TW 1	
						TW 2	2	2	100%	TW 2	
						TW 3	3	3	100%	TW 3	
						TW 4	4	4	100%	TW 4	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Laporan	Sum	Maximize	4	TW 1	1	1	100%	TW 1	
						TW 2	2	2	100%	TW 2	
						TW 3	3	3	100%	TW 3	
						TW 4	4	4	100%	TW 4	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	Paket	Sum	Maximize	2	TW 1				N/A	N/A
						TW 2	2	2	100%	TW 2	
						TW 3	2	2	100%	N/A	
						TW 4	2	2	100%	N/A	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JUMLAH PAKET PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	Paket	Sum	Maximize	1	TW 1				N/A	N/A
						TW 2	1	1	100%	TW 2	
						TW 3	1	1	100%	N/A	
						TW 4	1	1	100%	N/A	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	Paket	Sum	Maximize	1	TW 1				N/A	N/A
						TW 2				N/A	N/A
						TW 3	1	1	100%	TW 3	
						TW 4	1	1	100%	N/A	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	Paket	Sum	Maximize	1	TW 1				N/A	N/A
						TW 2	1	1	100%	TW 2	
						TW 3	1	1	100%	N/A	
						TW 4	1	1	100%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	Unit	Sum	Maximize	3	TW 1				N/A	N/A
						TW 2	1	1	100%	TW 2	
						TW 3	2	2	100%	TW 3	
						TW 4	3	3	100%	TW 4	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	Laporan	Sum	Maximize	12	TW 1	3	3	100%	TW 1	
						TW 2	6	6	100%	TW 2	
						TW 3	9	9	100%	TW 3	
						TW 4	12	12	100%	TW 4	
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	Laporan	Sum	Maximize	4	TW 1	1	1	100%	TW 1	
						TW 2	2	2	100%	TW 2	
						TW 3	3	3	100%	TW 3	
						TW 4	4	4	100%	TW 4	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penyewa Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DISAYARKAN PAJAK DAN PERBINTANNYA	Unit	Take Last Known	Maximize	8	TW 1				N/A	N/A
						TW 2	8	8	100%	TW 2	
						TW 3	8	8	100%	N/A	
						TW 4	8	8	100%	N/A	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	Unit	Sum	Maximize	16	TW 1	4	4	100%	TW 1	
						TW 2	9	9	100%	TW 2	
						TW 3	13	13	100%	TW 3	
						TW 4	16	16	100%	TW 4	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	Unit	Sum	Maximize	2	TW 1				N/A	N/A
						TW 2				N/A	N/A
						TW 3	2	2	100%	TW 3	
						TW 4	2	2	100%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/DIREHABILITASI	Unit	Sum	Maximize	17	TW 1	4	4	100%	TW 1	 Validasi
						TW 2	9	9	100%	TW 2	 Validasi
						TW 3	13	13	100%	TW 3	 Validasi
						TW 4	17	17	100%	TW 4	 Validasi

3.2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan hasil pengolahan data survey Kepuasan Masyarakat Kelurahan Senayan dengan predikat sangat memuaskan yaitu 96,11(A sangat memuaskan).

Tabel :3.2.
Data Hasil SKM Kelurahan Senayan tahun 2025

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Detail Nilai SKM Per Unsur

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	3,86	3,86	3,87	3,88	3,86	3,88	3,84	3,88	3,90	96,67
Ketertiban Umum	3,80	3,84	3,85	3,87	3,86	3,84	3,86	3,84	3,85	96,21
PKK	3,84	3,84	3,84	3,85	3,84	3,83	3,85	3,84	3,85	96,08
Posyandu	3,84	3,86	3,87	3,89	3,89	3,88	3,90	3,89	3,82	97,11
PPSU	3,79	3,82	3,83	3,83	3,89	3,81	3,82	3,81	3,91	95,39
RT/RW, LMK dan FKDM	3,80	3,82	3,79	3,83	3,82	3,83	3,83	3,80	3,80	95,36
Rata-rata IKM per unsur	3,82	3,84	3,84	3,86	3,85	3,85	3,85	3,84	3,86	96,11
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rata-rata IKM Layanan	96,11 (A atau Sangat Baik)									

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3.3. Program kerja Badan Publik Kelurahan

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban

Pelayanan Bidang Trantib meliputi penciptaan keamanan dan ketertiban yang didukung oleh 3 pilar, FKDM dan Pol PP baik tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Beberapa Titik Rawan Parkir Liar / diatas trotoar yang ada di wilayah Kelurahan Senayan antara lain adanya karena terdapat beberapa lokasi :

- o Perumahan Komplek Menteri
- o Jl. Senopati depan District 8

Di wilayah Kelurahan Senayan terdapat Jalan Protokol (Jl. Jend. Gatot Subroto dan Jl. Jend. Sudirman) yang merupakan juga jalan kebanggaan Kota Administrasi Jakarta Selatan, juga sebagai sasaran Operasi Penyandang

Masalah Kerawanan Sosial (PMKS) dan dan pedagang Asongan mangkal di sisi jalan tersebut. Namun hal tersebut diantisipasi terus oleh 3 pilar, pol pp kelurahan dan kecamatan dengan melakukan lingkaran wilayah, penertiban wilayah, dan melakukan piket/jaga pada titik-titik rawan pada jam tertentu setiap harinya.

b. Posyandu Lansia dan balita

Pengecekan kesehatan balita dan lansia di Kelurahan Senayan melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Terintegrasi. Jumlah Posyandu di Kelurahan Senayan yaitu 1 Posyandu Balita dan 1 Posyandu Lansia. Pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan.

Tabel :3.3.
Posyandu Balita dan Lansia Kelurahan Senayan

No.	Posyandu	Jumlah ber KMS	Jumlah Yang ditimbang	Yang naik BB	Keterangan
1.	Balita	20	20	20	
2.	Lansia	50	50	50	

c. Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU)

Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Tk. Kelurahan berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) Tk. Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/ masyarakat di wilayah kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

Ruang lingkup PPSU Tk. Kelurahan meliputi penanganan prasarana dan sarana jalan, penanganan prasarana dan sarana saluran, penanganan prasarana dan sarana taman, penanganan prasarana dan sarana kebersihan, penanganan prasarana dan sarana penerangan jalan umum. Pekerjaan pada ruang lingkup tersebut dilakukan oleh pekerja PPSU yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2026, terdapat 37 pekerja PPSU yang menandatangani Kontrak Kerja per tanggal 31 Desember 2025 .

d. Kerjabakti Lingkungan

Salah satu upaya peningkatan kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Senayan yaitu melalui kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan setiap Hari Minggu dengan titik lokasi pengerjaan secara bergantian setiap minggunya dimasing-masing RW dengan melibatkan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan PPSU Kelurahan.

e. Penataan Kawasan

Penataan Kawasan pada tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Lokasi sesuai dengan target per triwulan.

Tabel :3.4.
Lokasi Penataan Kawasan Kelurahan Senayan
Tahun 2025

No.	Triwulan	Lokasi	Dokumentasi
1.	I	Jl.Senopati RT.008/02	
2.	II	Jl.Senopati I dalam Rt.002/02	

3.	III	Jl.Widya Candra VIII RW 01	
4.	IV	Jl.Widya caandra VIII	

f. Target dan capaian ZIS , PMI

Pencapaian Zakat ,Infak,Shodaqah (ZIS) dan bulan Dana PMI tahun 2025 Kelurahan Senayan Adalah sebagai berikut :

**Tabel :3.5.
Target dan Capaian ZIS,PMI Kelurahan Senayan
Tahun 2025**

Tahun 2025	ZIS		%	PMI		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	139.500.000	50.041.000	35,8	17.300.000	22.355.000	129,2

g. Penerimaan Pajak PBB

Penerimaan Pajak Bumi Bangunan tahun 2025 berdasarkan laporan dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Kebayoran baru adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.6.
Target dan Capaian Penerimaan PBB Kelurahan Senayan
Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	% (Pencapaian)	Keterangan
2025	191.886.324.000	199.982.439.428	104,2	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas , mulai dari BAB I sampai dengan BAB III dapat disimpulkan bahwa capaian/ realisasi Kinerja Kelurahan Senayan terlaksana sesuai dengan Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani/ditetapkan (Jadwal dan pelaksanaan sesuai).

4.2. Saran

- a. Saran kepada Badan Publik Kelurahan Senayan agar terus melaksanakan /merealisasikan Rencana Kinerja secara baik guna memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal.
- b. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .